

The Role of Regional Government Information Systems (SIPD) in Increasing Financial Accountability and Transparency in Paniai Regency

Christian Agustinus Karepouwan^{1*)}

¹⁾ Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus

^{*)}Correspondence Author: chriskarepouwan@outlook.com, Makassar, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v6i1.2535>

Abstract

The development of information technology has brought significant changes in various aspects of government, including regional financial management. Industrial Revolution 5.0 emphasizes the use of automatic technology and artificial intelligence which can increase bureaucratic efficiency and reduce human error in data management. Information systems (IS) are technologically assisted human workforce systems designed to assist with administrative and operational tasks. The development of interactive connections between humans, data, information, technology and algorithms is meant by this. This research aims to analyze the role of the Regional Government Information System (SIPD) in increasing financial accountability and transparency in Paniai Regency, Central Papua Province. SIPD is an information technology-based system implemented to support regional financial management more effectively, efficiently and transparently. The implementation of SIPD takes the form of a website with the aim of making it easier and faster to carry out supervision and evaluation of public services. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The research results show that the implementation of SIPD in Paniai Regency has had a positive impact in increasing regional financial transparency and facilitating the budget reporting and monitoring process. However, there are still several challenges in its implementation, such as limited human resources who understand the system and technological infrastructure constraints. This research provides recommendations for increasing human resource capacity and improving infrastructure to support the optimization of SIPD implementation.

Keywords: SIPD, Accounttability, Transparency, Local Finance, Paniai Regency

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Revolusi Industri 5.0 menekankan penggunaan teknologi otomatis dan kecerdasan buatan yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi serta mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan data. Sistem informasi (SI) adalah sistem tenaga kerja manusia yang dibantu secara teknologi yang dirancang untuk membantu tugas-tugas administratif dan operasional. Perkembangan koneksi interaktif antara manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma dimaksudkan dengan hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. SIPD merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang diterapkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Penerapan SIPD ini berbentuk website dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Paniai telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah serta memudahkan proses pelaporan dan pengawasan anggaran. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sistem serta kendala infrastruktur teknologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan infrastruktur guna mendukung optimalisasi penerapan SIPD.

Kata Kunci: SIPD, Akuntabilitas, Transparansi, Keuangan Daerah, Kabupaten Paniai

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Revolusi Industri 5.0 menekankan penggunaan teknologi otomatis dan kecerdasan buatan yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi serta mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan data (Tumija & Sinurat, 2023). Manusia telah mengembangkan peningkatan teknologi yang semakin canggih dan berkembang dari waktu ke waktu. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk peningkatan dari pengelolaan pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah.

Sistem informasi (SI) adalah sistem tenaga kerja manusia yang dibantu secara teknologi yang dirancang untuk membantu tugas-tugas administratif dan operasional. Perkembangan koneksi interaktif antara manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma dimaksudkan dengan hal ini. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menciptakan suatu produk dengan kumpulan berbagai jenis data yang dapat diolah.

Tujuan dari sistem informasi adalah untuk memproses berbagai jenis data yang dikendalikan oleh setiap bisnis atau organisasi untuk meminimalkan kebutuhan sumber daya dan mempercepat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang terkontrol mengurangi birokrasi yang ada dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Penciptaan suatu produk yang mencakup kumpulan informasi merupakan tujuan dari pengembangan sistem informasi. Tidak diragukan lagi terdapat banyak jenis data berbeda dalam suatu sistem yang dapat dianalisis dan disajikan kepada pengguna dengan cara yang intuitif.

Penerapan SIPD ini berbentuk website dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah (Nasution & Nurwani 2021).

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik menjadi fokus utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang akuntabel dan transparan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Fathani, Pribadi et al., 2022; Aristoni & Ismayawati, 2020; Karmanis, 2022). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai

tantangan dan permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan-tujuan tersebut (Hanafi, 2020). Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi termasuk ketidakmampuan menyampaikan informasi dengan cepat, kurangnya koordinasi antar unit dalam pemerintahan daerah, serta masih adanya ketidaktransparanan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan atas aktivitas dan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan ketika informasi dipertukarkan secara bebas di berbagai proses kelembagaan dalam administrasi pemerintahan dan tersedia bagi masyarakat umum bila diperlukan, maka pemerintahan tersebut dianggap transparan (terbuka). Informasi yang tersedia dan mudah dipahami dapat dimanfaatkan sebagai alat pemantauan dan penilaian kinerja pemerintah. Unsur-unsur fungsional pemerintahan yang berhasil dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut merupakan bagian dari pemerintahan yang transparan (Beltahmamero, 2017).

Di Kabupaten Paniai, SIPD mulai diimplementasikan sejak tahun 2021. Sebelum adanya SIPD, pengelolaan keuangan daerah masih menggunakan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan, duplikasi data, dan penyalahgunaan anggaran. Meskipun penerapan SIPD telah memberikan manfaat, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di Kabupaten Paniai.

Penerapan SIPD juga sebagai salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan Opini BPK dalam penyajian pengelolaan keuangan di seluruh instansi terkait. Fungsi BPK sebagai lembaga pengawasan yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan eksternal atas pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Opini BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Paniai sejak 2019 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Berkaitan dengan hal tersebut, penyajian pengelolaan keuangan di Kabupaten Paniai sudah terselenggara dengan baik. Namun, untuk meningkatkan dan mempertahankan opini WTP tersebut dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerahnya, pemerintah harus menerapkan SIPD sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, penerapan ini belum berjalan maksimal karena masih adanya kendala dalam pengoperasiannya.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Paniai akan menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan dan Pelaporan sebagai Aplikasi Pengelolaan Keuangan Bidang Penatausahaan dan Pelaporan dan Akuntansi. Untuk itu dibutuhkan penelitian sebagai landasan penerapan yang diharapkan dapat berjalan secara optimal. Kesiapan Sumber Daya Manusia lewat Pelatihan dan Bimbingan Teknis diharapkan berjalan secara optimal dan efisien seiring dengan penerapan Penatausahaan dan Pelaporan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Paniai.

Dalam perkembangan dan implementasi SIPD di Kabupaten Paniai, terdapat sejumlah tantangan/kendala teknis, kebijakan, dan budaya di tingkat pemerintahan daerah yang perlu diatasi. Selain itu, evaluasi terhadap peranan implementasi SIPD dalam meningkatkan pelayanan publik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa investasi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki peran dalam implementasi SIPD di Kabupaten Paniai. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan metode penggambaran dan penginterpretasian (penafsiran) keadaan objek sesuai dengan apa adanya yang diperoleh di lapangan (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggambarkan tentang peran SIPD di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah. Data pendukung dan pelengkap lainnya adalah dari buku-buku, jurnal serta dokumen laporan yang berkaitan dengan materi pembahasan, serta dari sumber sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor BAPPEDA dan BKAD Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan tepat mengenai SIPD Kabupaten Paniai sebanyak 9 orang.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai BKAD dan Bappeda Kabupaten Paniai. Data primer adalah data yang berasal dari hasil wawancara dengan responden ditambah informan kunci yang relevan. Informan kunci merupakan sumber informasi utama yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file sehingga data harus dicari melalui narasumber/responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Data Sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan keuangan daerah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder merupakan pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diambil, misalnya dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan penelitian lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk terwujudnya *good governances* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Besarnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang lengkap dan transparan serta ketersediaan dan aksesibilitasnya kepada pengguna informasi (Damayanti, 2018).

Pemanfaatan teknologi dalam rangka mewujudkan informasi yang akurat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta menerapkan *good governances* dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini membuat seluruh SKPD yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Paniai diwajibkan menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Paniai.

Diharapkan dengan adanya SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan

pemerintah karena lebih mudah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai.

Selain itu, masalah kedisiplinan dalam mengisi kegiatan harian juga menjadi tantangan. Beberapa pegawai masih cenderung tidak disiplin dalam mengisi data kinerja harian, meskipun telah ada pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan sistem ini. Sebagian besar pegawai masih mengisi data kinerja secara tidak teratur, hanya mengisi data satu minggu sekali, padahal pengisian seharusnya dilakukan setiap hari. Meskipun demikian, beberapa informan mengungkapkan bahwa dengan adanya sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak disiplin, tingkat kedisiplinan pegawai dalam mengisi data kinerja semakin meningkat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Kinerja di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja pegawai. Sistem ini mampu mempermudah proses pemantauan kinerja, meningkatkan kedisiplinan, dan memberikan informasi yang cepat dan akurat mengenai prestasi kerja pegawai. Namun, untuk mengoptimalkan penerapannya, dibutuhkan perhatian lebih pada aspek teknis dan peningkatan kedisiplinan pegawai dalam pengisian data kinerja secara rutin dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan mengenai penerapan aplikasi “Sipendekar” dalam penilaian kinerja pegawai, dapat disimpulkan beberapa temuan yang berkaitan dengan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, intensi pengguna, dan kemanfaatan aplikasi tersebut.

1. Informan penelitian adalah subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh. Informan memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Berikut informan penelitian di Kantor BKAD dan Bappeda Kabupaten Paniai.

Tabel 1. Daftar Nama Informan

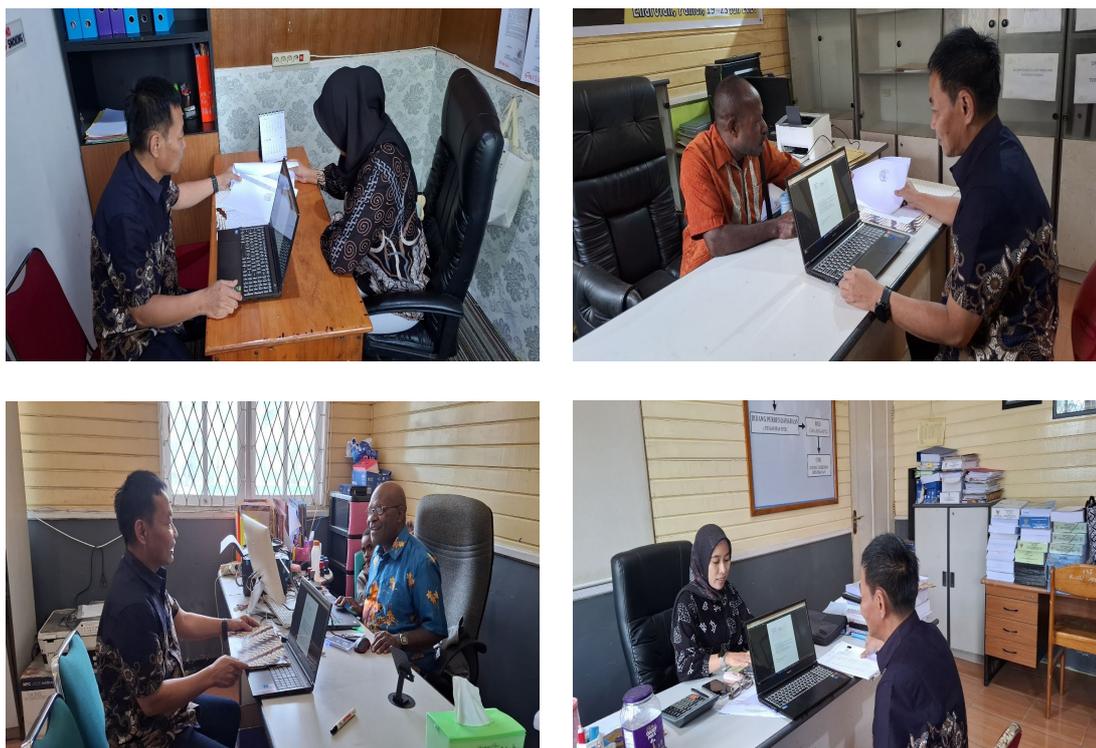
| No | Nama | Jabatan | Instansi |
|----|---|--|---------------------|
| 1 | Alexander Manansang, S.Sos, MM NIP: 197411022000121004 | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah | BKAD Kab. Paniai |
| 2 | Yance Nawipa, S.Sos NIP: 197701152008011024 | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah | BKAD Kab. Paniai |
| 3 | Ludia Kalaba, SE, MM NIP: 197911102007012015 | Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah | BKAD Kab. Paniai |
| 4 | Sudarti, SE NIP: 198407152010012005 | Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah | BKAD Kab. Paniai |
| 5 | Petrus Pigome, S.Sos NIP: 197704092006051003 | Kepala Bidang Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah | BKAD Kab. Paniai |
| 6 | Sri Hisnawati, SE NIP: 198506102011042001 | Kepala Sub Bagian Belanja Rutin Badan Keuangan dan Aset Daerah | BKAD Kab. Paniai |
| 7 | Astuti Arruan Bone, SE, MM NIP: 198107142009092001 | Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah | BKAD Kab. Paniai |
| 8 | Irvan Roberto Sapulete, S.STP NIP: 199710052018081001 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | BAPPEDA Kab. Paniai |
| G | Peli Yogi, SE NIP: 197512202009091001 | Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | BAPPEDA Kab. Paniai |

Sumber : Kabupaten Paniai, 2025

2. Pemerintah melakukan inovasi berupa pembuatan aplikasi SIPD dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang terprogram dipusat dalam satu data. SIPD memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara real-time dan dapat diakses oleh berbagai pihak, sehingga meminimalkan peluang terjadinya manipulasi anggaran. Informan penelitian menyatakan bahwa SIPD telah membantu dalam penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diaudit dengan lebih transparan. Melalui SIPD juga, sistem pengelolaan keuangan terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. *Output* dari SIPD ialah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat dihasilkan jika SIPD dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dengan adanya SIPD maka keuangan Pemda Kabupaten Paniai menjadi akuntabel. Hal ini didukung oleh pernyataan beberapa informan.

3. Akuntabilitas menjadi asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan informan mendukung bahwa dengan adanya implementasi SIPD dapat meningkatkan akuntabilitas dalam keuangan daerah Kabupaten Paniai.
4. SIPD diharapkan dapat memenuhi terwujudnya keterbukaan/transparansi informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik. Pengelolaan Informasi Daerah juga diamanatkan di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang dikelola dalam SIPD. Terkait dengan peningkatan transparansi dalam keuangan, beberapa informan menyatakan hal yang sama.





Gambar 1. Wawancara dengan Informan

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai dan Kantor Bapanan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paniai, maka di simpulkan bahwa Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa:

SIPD memiliki peran penting dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai. Dengan kata lain Masyarakat bisa menjadi mitra pemerintah, sebagai kontrol terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Paniai. Implementasi SIPD juga memberikan berbagai keuntungan, namun di lain pihak tetap ada kendala dalam pengimplementasian SIPD di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.

REFERENSI

Aristoni & Ismayawati, Any. (2020). Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada

- Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Volume 11, Nomor 1, Juni 2020
- Beltahmamero, S. (2017). Inovasi Pelayanan Pemerintahan Desa Melalui E-Goverment (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Penggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(3).
- Elkha, F., & Wahidahwati, W. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Fathani, Aqil Teguh., Pribadi, Ulung., Suling, Cindy Fabrizia., Azmi, Novia Amirah. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Bantul. JUSTIN: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi. Vol. 10, No. 1.
- Gultom, L. L. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(11).
- Hanafi, M. (2020). Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Efektivitas Content.
- Herdian, C. (2022). Analisis dan Desain Sistem Informasi Pelatihan Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Subang (Studi Kasus: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna). *The World of Public Administration Journal*.
- Julius, P., & Salsabila, S. (2018). Akuntabilitas: Menuju Indonesia Berkinerja. *Jakarta: Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan*.
- Karmanis, K. (2022). Urgensi Reformasi Administrasi Dalam Citizen-Centric, dan E-Government Di Indonesia. *Public Service and Governance Journal*.
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(1).

- Lestari, U. P. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1).
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mindarti, L., Saleh, C., & Galih, A. (2022). Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*.
- Nasution & Nurwani M, (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.
- Nidya V, A., & M., Ahyaruddin. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Jurnal Digital Bussiness*. 1(1).
- Permendagri No.70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Andi Offset.
- Tumija, Hendra, A., & Sinurat M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1).
- Ulya, C., & Astuti, E. B. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat Dan Lurah Kab Tegal). *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2).
- Umar, Z., Syawalina, C. F., & Khairunnisa, K. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Kolegial*, 6(2), 136–148.

Website: <https://www.nokenlive.com/2020/08/25/pertama-kalinya-paniai-raih-opini-wtp/>